

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai kebijakan distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi tahun 2025 mengungkapkan dinamika persepsi publik yang kompleks, faktor-faktor pembentuknya yang beragam, serta dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

4.1.1. Dinamika Persepsi publik Kebijakan LPG pada Tahun 2025

Dinamika persepsi publik terhadap kebijakan distribusi LPG bersubsidi pada tahun 2025 secara nasional didominasi oleh sentimen negatif yang kuat, mencapai 68,0% dari total komentar yang dianalisis di platform YouTube. Eskalasi sentimen negatif ini terutama terjadi pada awal Februari 2025, dipicu oleh pemberlakuan kebijakan distribusi pembelian melalui pengecer dan keharusan menggunakan NIK/KTP di pangkalan resmi, yang diperparah oleh viralnya konten media digital yang menyoroti kesulitan akses masyarakat dan insiden kemanusiaan akibat antrean panjang. Reaksi publik cenderung bersifat spontan, emosional, dan masif di fase awal, sebelum akhirnya menurun seiring berkurangnya eksposur mediatik. Teridentifikasi pula adanya sentimen kerinduan terhadap model "subsidi terbuka" yang lebih mudah diakses. Secara keseluruhan, persepsi publik telah berevolusi dari penerimaan positif di awal program konversi LPG menjadi keresahan akibat ketimpangan distribusi, dan berpuncak pada perdebatan sengit mengenai hak atas subsidi versus efisiensi dan ketepatan sasaran.

4.1.2. Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Publik

Pembentukan persepsi publik terkait kebijakan LPG bersubsidi tahun 2025 dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor, di antaranya:

1. Framing Media dan Aktor Politik: Media massa dan digital, khususnya YouTube, memainkan peran sentral melalui framing berita yang seringkali emosional, populistis, dan dramatis. Aktor politik kritis, seperti Adian Napitupulu, secara signifikan membentuk narasi publik dengan membingkai isu sebagai kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil dan mengkritik penargetan pengecer. Narasi dominan berkuat pada dikotomi "pro-rakyat vs elit".
2. Pengalaman Langsung Masyarakat: Kesulitan akses fisik ke pangkalan resmi, antrean panjang, dampak ekonomi langsung terhadap pengecer kecil, serta insiden kemanusiaan menjadi pengalaman kolektif yang memperkuat sentimen negatif.
3. Komunikasi Pemerintah: Minimnya sosialisasi yang efektif dan empatik, penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami, serta respons pejabat yang terkadang kontras dengan realitas lapangan menjadi pemicu ketidakpuasan dan kebingungan publik. Meskipun demikian, respons pemerintah melalui Siaran Pers ESDM dan instruksi Presiden untuk mereposisi pengecer menunjukkan adanya adaptasi terhadap tekanan publik.
4. Interaksi Sosial dan Viralitas di Media digital: Platform YouTube menjadi arena utama bagi ekspresi publik. Komentar warganet yang

emosional dan testimoni pribadi, ditambah dengan konten viral, mempercepat penyebaran sentimen negatif dan membentuk persepsi kolektif.

5. Konflik Nilai terkait Keadilan Energi dan Subsidi: Terjadi benturan persepsi antara subsidi sebagai hak dasar warga negara yang harus mudah diakses dengan narasi pemerintah mengenai urgensi subsidi yang tepat sasaran untuk efisiensi fiskal dan pencegahan kebocoran.

4.1.3. Dampak Politis Persepsi Publik

Dampak paling signifikan dari persepsi publik yang terbentuk adalah terdegradasinya legitimasi kebijakan dan aktor pemerintah secara efektif. Proses ini berjalan melalui tiga tahapan konkret:

1. Delegitimasi Kebijakan: Gelombang sentimen negatif yang masif dan narasi perlawanan yang viral membuat kebijakan distribusi awal menjadi tidak dapat dipertahankan secara politis (*politically untenable*). Persepsi publik berhasil mentransformasikan dirinya dari sekadar sentimen menjadi kekuatan politik riil yang menuntut perubahan.
2. Revisi Kebijakan sebagai Bukti Kapitulasi: Bukti paling nyata dari runtuhnya legitimasi ini adalah keputusan pemerintah untuk merevisi kebijakan secara drastis melalui instruksi langsung dari Presiden. Ini bukanlah evaluasi teknis, melainkan sebuah manuver politik untuk meredam krisis kepercayaan yang lebih luas.
3. Delegitimasi Aktor dan Transfer Legitimasi: Dampak tidak berhenti pada kebijakan, tetapi merembet ke level personal. Reputasi Menteri ESDM

sebagai wajah kebijakan mengalami kerusakan signifikan. Sebaliknya, aktor politik oposisi yang berhasil menjadi "Juru Bicara Rakyat" mengalami peningkatan reputasi dan legitimasi personal, sebagaimana terbukti dari anomali sentimen positif yang tinggi pada konten yang berfokus padanya.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan mengenai dinamika persepsi publik dan framing kebijakan distribusi LPG bersubsidi tahun 2025, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang teridentifikasi. Pertama, mengingat dominasi analisis pada platform YouTube, studi sangat direkomendasikan untuk memetakan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam framing isu, intensitas sentimen, serta aktor-aktor kunci yang memengaruhi diskursus publik. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai ekosistem persepsi digital terkait kebijakan energi. Kedua, penelitian longitudinal yang memantau evolusi persepsi publik dan dampak kebijakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya enam bulan hingga satu tahun pasca-implementasi penuh, akan sangat berharga untuk mengukur tingkat adaptasi masyarakat, efektivitas penyesuaian kebijakan oleh pemerintah, serta keberlanjutan sentimen awal yang teridentifikasi.

Lebih lanjut, untuk menggali dimensi kemanusiaan dan realitas lapangan secara lebih komprehensif, penelitian kualitatif lanjutan dengan cakupan responden yang lebih luas dan beragam sangat diperlukan. Wawancara mendalam dengan berbagai lapisan masyarakat terdampak di berbagai wilayah (tidak hanya terbatas

pada satu kota studi), pengecer yang berhasil atau gagal bertransformasi menjadi sub-pangkalan, serta aktor pemerintah di tingkat implementasi kebijakan, dapat mengungkap narasi, tantangan, dan strategi bertahan hidup yang tidak tertangkap melalui analisis sentimen media digital semata. Selain itu, fokus penelitian juga dapat diarahkan pada evaluasi efektivitas strategi komunikasi publik yang diterapkan pemerintah dalam merespons krisis persepsi ini, mengidentifikasi pendekatan yang berhasil dan gagal, serta merumuskan model komunikasi kebijakan yang lebih empatik, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika digital. Mengingat masifnya peran media digital, investigasi mengenai peran influencer non-politik dan *Key Perception Leaders* (KOL) lokal dalam membentuk atau menjembatani persepsi publik terkait isu sensitif seperti subsidi energi juga dapat menjadi area kajian yang menarik. Terakhir, untuk melengkapi analisis kualitatif dan sentimen, penelitian kuantitatif yang mengukur dampak ekonomi mikro secara konkret pada rumah tangga dan UMKM akibat perubahan skema distribusi LPG akan memberikan basis data yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti dan berkeadilan sosial.